

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2018
TENTANG
PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA DAN/ATAU HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan dan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, perlu ~~menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan~~ mengatur ketentuan tentang ~~Tindakan~~ pengeluaran media pembawa hama dan penyakit ikan karantina dan/atau hasil perikanan;
 - b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan perdagangan internasional, perkembangan teknologi, dan perkembangan sistem perkarantinaan ikan, kebutuhan untuk mengintegrasikan sistem Pengendalian Mutu Hasil Perikanan ke dalam sistem perkarantinaan ikan, serta adanya perubahan organisasi, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2005

tentang Tindakan Karantina Ikan untuk Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan **sebagaimana dimaksud** pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4197);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah

Produk Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5726);

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
- ~~8. *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33/PERMEN KP/2014 tentang Instalasi Karantina Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1161);*~~
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1758);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA DAN/ATAU HASIL PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengeluaran adalah mengeluarkan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri atau dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di dalam air, dalam keadaan hidup atau mati, termasuk bagian-bagiannya.
3. Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina, yang selanjutnya disebut Media Pembawa, adalah ikan dan/atau Benda Lain yang dapat membawa hama dan penyakit ikan karantina.
4. Benda Lain adalah Media Pembawa selain Ikan yang mempunyai potensi penyebaran hama dan penyakit Ikan Karantina.
5. Barang Bawaan adalah Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang dibawa oleh pemilik sebagai penumpang atau awak alat angkut dalam ukuran, jumlah, dan jenis tertentu.
6. Hasil Perikanan adalah Ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa Ikan segar, Ikan beku, dan

olahan lainnya.

7. Hama dan Penyakit Ikan, yang selanjutnya disingkat HPI, adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian Ikan.
8. Hama dan Penyakit Ikan Karantina, yang selanjutnya disingkat HPIK, adalah semua HPI yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di Area tertentu di wilayah Negara Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
9. Tempat Pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos lintas batas negara, **dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu**, yang ditetapkan sebagai tempat untuk mengeluarkan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan.
10. Tindakan Karantina Ikan, yang selanjutnya disebut Tindakan Karantina, adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu Area ke Area lain di dalam negeri, atau keluarnya HPI dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
11. Unit Pengolahan Ikan yang selanjutnya disingkat UPI, adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktifitas pengolahan ikan.
12. Program Manajemen Mutu Terpadu, yang selanjutnya disingkat PMMT, adalah Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang dikembangkan berdasarkan konsepsi *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP)
13. Pengendalian Mutu adalah semua kegiatan yang meliputi inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan Hasil Perikanan.
14. Permohonan Pemeriksaan Karantina Ikan serta Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, yang selanjutnya disingkat PPK adalah bentuk pelaporan dan penyerahan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang dimasukkan dari luar negeri dan/atau dari suatu Area ke Area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari wilayah Negara Republik Indonesia oleh

pemilik/kuasanya kepada Petugas Karantina.

15. Surveilans adalah kegiatan inspeksi penilaian kesesuaian yang dilakukan secara sistematis dan berulang sebagai dasar untuk memelihara validitas pernyataan kesesuaian.
16. Inspeksi adalah Pemeriksaan terhadap suatu unit produksi primer, pengolahan dan distribusi serta manajemennya termasuk sistem produksi, dokumen, pengujian produk, asal dan tujuan produk, input dan output dalam rangka melakukan verifikasi.
17. Pengambilan Contoh adalah proses pemilihan dan pengambilan kemasan atau unit contoh dari suatu lot, produksi, atau populasi.
18. Petugas Karantina Ikan yang selanjutnya disebut Petugas Karantina adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi tugas untuk melakukan Tindakan Karantina, Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Area adalah meliputi daerah dalam suatu pulau, pulau, atau kelompok pulau di dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran hama dan penyakit ikan **dan pengendalian mutu**.
20. Pemeriksaan adalah tindakan untuk mengetahui kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan serta untuk mendeteksi HPIK dan/atau HPI.
21. Penahanan adalah tindakan menahan Media Pembawa yang akan dimasukkan ~~atau dikeluarkan~~ ke atau dari wilayah Negara Republik Indonesia atau dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
22. Penolakan adalah tindakan tidak diijinkannya Media Pembawa dimasukkan atau dikeluarkan ke atau dari suatu Area atau dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
23. Perlakuan adalah tindakan membebaskan atau menyucikan Media Pembawa dari HPIK dan/atau HPI.
24. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan Media Pembawa sebagai tindak lanjut dari Tindakan Karantina sebelumnya.
25. Pembebasan adalah tindakan mengizinkan Media Pembawa untuk dimasukkan atau dikeluarkan ke atau dari suatu Area

atau dalam wilayah Negara Republik Indonesia melalui tempat-tempat pemasukan atau Pengeluaran yang telah ditetapkan setelah dikenakan Tindakan Karantina sebelumnya.

26. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan, yang selanjutnya disingkat SKIPP, adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh Petugas Karantina untuk Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Media Pembawa yang tercantum di dalamnya tidak tertular dari HPIK dan/atau HPI yang disyaratkan, dan/atau Hasil Perikanan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan Hasil Perikanan.
27. **Sertifikat Kesehatan Ikan dan Mutu Hasil Perikanan Domestik**, yang selanjutnya disebut **SKIMHP Domestik**, adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh Petugas Karantina untuk Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Media Pembawa yang tercantum di dalamnya bebas dari HPIK, serta memenuhi persyaratan mutu dan keamanan Hasil Perikanan.
(nama sertifikat disesuaikan dengan SE Kepala BKIPM No. 843/BKIPM/X/2017)
28. Surat Persetujuan Muat, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh Petugas Karantina di Tempat Pengeluaran, yang menyatakan bahwa Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan disetujui untuk dimuat ke atas alat angkut.
~~Surat Persetujuan Muat, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen resmi selain SKIPP~~
29. Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produk Perikanan, yang selanjutnya disingkat SKLL adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh Petugas Karantina di Tempat Pengeluaran yang menyatakan bahwa Media Pembawa yang berupa Ikan atau produk perikanan yang tercantum didalamnya dapat dilalulintasbebasan ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

29a. Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produk Perikanan, yang

selanjutnya disingkat SKLL adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh Petugas Karantina di Tempat Pengeluaran yang menyatakan bahwa Media Pembawa atau Hasil Perikanan yang tercantum didalamnya dapat dilalulintasbebaskan keluar wilayah Negara Republik Indonesia atau ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

30. Surat Keterangan Benda Lain yang selanjutnya disingkat SKBL adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh Petugas Karantina di tempat Pengeluaran, yang menyatakan bahwa Media Pembawa berupa benda lain yang tercantum di dalamnya dalam keadaan baik dan/atau tidak rusak/busuk atau tidak tertular HPIK.
31. Instalasi Karantina Ikan yang selanjutnya disebut Instalasi Karantina adalah tempat beserta segala sarana dan fasilitas yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan Tindakan Karantina.
32. Pemilik Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan, yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang atau badan hukum yang memiliki Media Pembawa dan/atau yang bertanggung jawab atas pemasukan, Pengeluaran atau transit Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan
33. Pemohon adalah Pemilik Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan atau kuasanya
34. Cara Karantina Ikan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CKIB adalah metode yang berisikan standar operasional prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa semua tindakan dan penggunaan fasilitas Instalasi Karantina dilakukan secara efektif, konsisten, sistematis dan memenuhi standar biosekuriti untuk menjamin kesehatan Ikan.
35. Tanda Pengaman Karantina Ikan, yang selanjutnya disebut Tanda Pengaman adalah segel dan/atau penanda yang digunakan sebagai bukti telah dilakukan Tindakan Karantina ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan.
36. Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut UPT KIPM

adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

37. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengendalian hama dan penyakit ikan dan lingkungan.
38. Inspektur Mutu adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan Pengendalian Mutu.
39. Kepala Badan adalah Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.
40. *Pelintas batas yaitu penduduk yang berdiam atau bertempat tinggal dalam wilayah perbatasan negara serta memiliki kartu identitas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan yang melakukan perjalanan lintas batas di daerah perbatasan melalui pos pengawas lintas batas. (Penjelasan dalam UU Kepabeanan)*

BAB II

PERSYARATAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA DAN/ATAU HASIL PERIKANAN

Pasal 2

- (1) Setiap Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri wajib:
 - a. melalui Tempat Pengeluaran yang telah ditetapkan;
 - b. dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina untuk keperluan Tindakan Karantina dan/atau Pengendalian Mutu;
 - c. memenuhi persyaratan dari negara tujuan; dan
 - d. dilengkapi dokumen lain yang dipersyaratkan.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri wajib

dilengkapi SKIPP dalam hal:

- a. Hasil Perikanan ditujukan untuk konsumsi; atau
 - b. Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan tujuan nonkonsumsi jika dipersyaratkan oleh negara tujuan.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Pengeluaran Hasil Perikanan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri wajib memiliki:
- a. sertifikat PMMT/HACCP; dan
 - b. nomor registrasi dalam hal dipersyaratkan negara tujuan.
- (4) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Pengeluaran Media Pembawa dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri wajib memiliki Sertifikat CKIB dalam hal negara tujuan mempersyaratkan pemeriksaan kesehatan.
- (5) Untuk Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan tujuan nonkonsumsi yang tidak dipersyaratkan SKIPP oleh negara tujuan, wajib dilengkapi SPM.
- (6) Terhadap Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri yang lokasi penerbitan SKIPP berbeda dengan Tempat Pengeluaran, wajib dilengkapi dengan SPM yang diterbitkan oleh Petugas Karantina di Tempat Pengeluaran.

Pasal 3

Persyaratan dari negara tujuan untuk Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan nonkonsumsi, dinyatakan dalam:

- a. PPK yang disampaikan oleh Pemilik/kuasanya;
- b. ketentuan impor dari negara tujuan; dan/atau
- c. ketentuan internasional yang mengikat.

Pasal 4

- (1) Setiap Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari satu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib:
- a. melalui Tempat Pengeluaran yang telah ditetapkan;
 - b. dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina untuk

keperluan Tindakan Karantina dan/atau Pengendalian Mutu Hasil Perikanan; dan

- c. dilengkapi dokumen lain yang dipersyaratkan.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari satu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib dilengkapi:
- a. SKIMHP Domestik;
 - b. SKBL, dalam hal Media Pembawa berupa Benda Lain; atau
 - c. SKLL, dalam hal Media Pembawa dikirim dari:
 - 1) satu Area yang bebas dari HPIK ke Area lain yang bebas dari HPIK;
 - 2) satu Area yang bebas dari HPIK ke Area lain yang tidak bebas dari HPIK; atau
 - 3) satu Area yang tidak bebas dari HPIK ke Area lain yang tidak bebas dari HPIK.

Pasal 5

Area bebas HPIK dan Area tidak bebas HPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada daerah sebar HPIK yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

Pelaporan dan penyerahan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilakukan mencegah:

- a. keluarnya Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi berdasarkan jenis, jumlah, ukuran, waktu Pengeluaran, lokasi Pengeluaran, dan/atau tujuan Pengeluaran; dan/atau
- b. keluarnya Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang tidak sesuai persyaratan.

Pasal 7

(1) Kewajiban melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) huruf b dan Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan, berupa;

a. Barang Bawaan;

~~b. Barang Bawaan yang berasal dari Instalasi Karantina yang telah memiliki sertifikat CKIB; atau~~

c. barang muatan atau kiriman pos; atau

d. barang muatan atau kiriman pos yang berasal dari Instalasi Karantina yang telah memiliki sertifikat CKIB.

(2) Untuk setiap Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang berupa:

a. Barang Bawaan, pemilik wajib melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan beserta dokumen persyaratannya kepada Petugas Karantina paling lambat 4 (empat) jam sebelum keberangkatan serta dilaksanakan Tindakan Karantina dan/atau Pengendalian Mutu;

~~b. Barang Bawaan yang berasal dari Instalasi Karantina yang telah memiliki sertifikat CKIB, pemilik wajib melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa beserta dokumen persyaratannya kepada Petugas Karantina paling lambat 2 (dua) jam sebelum keberangkatan dan dilaksanakan Tindakan Karantina;~~

c. barang muatan atau kiriman pos, pemilik wajib melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan beserta dokumen persyaratannya kepada Petugas Karantina paling lambat 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan Tindakan Karantina dan/atau Pengendalian Mutu; atau

d. barang muatan atau kiriman pos yang berasal dari Instalasi Karantina yang telah memiliki sertifikat CKIB, pemilik wajib melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa beserta dokumen persyaratannya kepada Petugas Karantina paling lambat 4 (empat) jam sebelum keberangkatan dan dilaksanakan Tindakan Karantina.

Pasal 8

(1) Kewajiban melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan dalam bentuk PPK oleh Pemohon kepada Kepala

UPT KIPM.

- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemohon kepada Kepala UPT KIPM di Tempat Pengeluaran dan/atau Kepala UPT KIPM yang memiliki wilayah kerja mencakup lokasi Instalasi Karantina atau UPI berada.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat pengirim;
 - b. nama dan alamat penerima;
 - c. nomor NPWP Pemohon atau Perusahaan;
 - d. nama komoditas/produk;
 - e. jenis komoditas;
 - f. bentuk dan jumlah kemasan;
 - g. tanggal pengiriman;
 - h. jenis alat angkut;
 - i. negara/Area tujuan;
 - j. nomor Sertifikat Instalasi Karantina Ikan untuk Pengeluaran Media Pembawa berbasis CKIB;
 - k. nomor sertifikat penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) untuk ekspor Hasil Perikanan tujuan konsumsi;
 - l. nomor registrasi ke negara mitra untuk ekspor Hasil Perikanan ke negara tujuan tertentu; dan
 - m. **dokumen lain yang dipersyaratkan.**
- (4) Penyampaian PPK dilakukan secara elektronik dengan memasukkan data dan mengunggah pindaian dokumen persyaratan ke dalam aplikasi.
- (5) Dalam hal keadaan tertentu, penyampaian PPK dapat dilakukan secara manual.
- (6) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu dalam hal ketiadaan akses jaringan internet atau force majeure lainnya yang tidak memungkinkan PPK diajukan secara elektronik.
- (7) Penyampaian PPK secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara menyerahkan salinan/tindasan/pindaian dokumen secara langsung kepada

Kepala UPT KIPM di tempat Pengeluaran dan/atau Kepala UPT KIPM yang memiliki wilayah kerja mencakup lokasi Instalasi Karantina atau UPI berada.

- (8) Penyampaian PPK untuk Barang Bawaan atau kiriman pos, harus melampirkan dokumen:
 - a. fotokopi atau hasil pindaian kartu identitas Pemohon; dan
 - b. fotokopi atau hasil pindaian Sertifikat CKIB untuk Media Pembawa yang berasal dari Instalasi Karantina yang telah memiliki Sertifikat CKIB atau sertifikat PMMT untuk Hasil Perikanan yang dipersyaratkan oleh negara tujuan.
- (9) Penyampaian PPK untuk barang muatan, harus melampirkan persyaratan:
 - a. fotokopi identitas Pemohon atau hasil pindaian kartu pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan;
 - b. fotokopi atau hasil pindaian Sertifikat CKIB untuk Media Pembawa yang berasal dari Instalasi Karantina yang telah memiliki Sertifikat CKIB atau sertifikat PMMT untuk Hasil Perikanan yang akan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia;
 - c. *packing list*; dan
 - d. *invoice*.

Pasal 9

- (1) Apabila ketentuan penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dapat dipenuhi, maka terhadap:
 - a. Media Pembawa, dilakukan analisis Media Pembawa; atau
 - b. Hasil Perikanan dilakukan evaluasi Hasil Perikanan, kecuali hasil perikanan berupa barang bawaan.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 tidak dapat dipenuhi, maka terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dilakukan tindakan penolakan disertai dengan alasan.

Pasal 10

- (1) Analisis Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

- ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
- a. jenis dan bentuk Media Pembawa; dan
 - b. persyaratan negara tujuan atau antararea;
- (2) Hasil analisis Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. Media Pembawa tidak dipersyaratkan Pemeriksaan kesehatan Ikan; atau
 - b. Media Pembawa dipersyaratkan Pemeriksaan kesehatan Ikan.
- (3) Terhadap Media Pembawa yang telah dianalisis dilakukan Tindakan Karantina.

BAB III TINDAKAN KARANTINA DAN PENGENDALIAN MUTU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Setiap Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan wajib dilakukan Tindakan Karantina dan/atau Pengendalian Mutu oleh Petugas Karantina.
- (2) Petugas Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pejabat fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan; dan
 - b. Pejabat fungsional Inspektur Mutu.

Bagian Kedua Tindakan Karantina

Pasal 12

- (1) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terhadap Pengeluaran Media Pembawa diawali dengan tindakan pemeriksaan:
 - a. kelengkapan dokumen; dan
 - b. keabsahan dokumen.

- (2) Pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, Pasal 4 ayat (1) huruf c, dan Pasal 8.
- (3) Pemeriksaan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi, dokumen:
 - a. ditandatangani, distempel atau diberi kode tertentu dan diterbitkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang;
 - b. masih berlaku;
 - c. asli atau salinan yang telah dilegalisir oleh pejabat dari instansi yang berwenang; dan
 - d. dalam keadaan utuh dan terbaca.

Pasal 13

- (1) Hasil pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berupa:
 - a. dokumen lengkap dan sah; atau
 - b. dokumen tidak lengkap dan/atau tidak sah.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen dinyatakan lengkap dan sah dilakukan pemeriksaan kebenaran isi dokumen.
- (3) Pemeriksaan kebenaran isi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara visual dengan memeriksa kesesuaian antara isi dokumen dengan jenis, jumlah, dan/atau ukuran Media Pembawa.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan tindakan penolakan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan kebenaran isi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dinyatakan benar dan Media Pembawa bukan merupakan jenis yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi, terhadap Media Pembawa dilakukan:
 - a. pemeriksaan kesehatan bagi Media Pembawa yang dipersyaratkan pemeriksaan kesehatan; atau

- b. pembebasan dengan menerbitkan SPM, SKLL, atau SKBL bagi Media Pembawa yang tidak dipersyaratkan pemeriksaan kesehatan.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan kebenaran isi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dinyatakan benar dan Media Pembawa merupakan jenis yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi, terhadap Media Pembawa dilakukan tindakan penolakan dan **tindakan lain** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan kebenaran isi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dinyatakan benar dan Media Pembawa busuk atau rusak, dikenai tindakan penolakan dengan menerbitkan Surat Penolakan disertai alasan.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan kebenaran isi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dinyatakan tidak benar, terhadap Pengeluaran Media Pembawa tersebut dikenai tindakan Penolakan dengan menerbitkan Surat Penolakan disertai alasan.
- (5) Dalam hal Media Pembawa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterbitkan Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dinyatakan bebas HPIK, terhadap Media Pembawa dapat dimanfaatkan oleh Negara.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan kebenaran isi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dinyatakan tidak benar dan Media Pembawa merupakan jenis yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi, terhadap Media Pembawa dilakukan tindakan penolakan dan **tindakan lain** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan kesehatan Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemeriksaan:
- c. klinis; dan/atau
 - d. laboratoris.
- (2) Pemeriksaan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya HPI yang dipersyaratkan negara tujuan atau HPIK pada Media Pembawa yang didasarkan pada pengamatan gejala, tingkah laku, atau perubahan abnormalitas.

- (3) Pemeriksaan laboratoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan Media pembawa bebas dari HPI yang dipersyaratkan negara tujuan atau HPIK berdasarkan pengujian di laboratorium.
- (4) Untuk keperluan Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengambilan contoh uji.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan contoh uji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 16

- (1) Terhadap Media Pembawa yang akan dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia apabila berdasarkan hasil pemeriksaan secara klinis dan/atau laboratoris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Media Pembawa tersebut:
 - a. bebas dari HPI yang dipersyaratkan negara tujuan, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan tindakan pembebasan dengan menerbitkan SKIPP;
 - b. tidak bebas dari HPI yang dipersyaratkan negara tujuan, maka terhadap Media Pembawa tersebut dapat diberikan perlakuan.
- (2) Apabila setelah dilakukan tindakan perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Media Pembawa:
 - a. dapat disembuhkan atau disucihamakan dari HPI yang dipersyaratkan negara tujuan, maka Media Pembawa tersebut dilakukan tindakan Pembebasan dengan menerbitkan SKIPP;
 - b. tidak dapat disembuhkan atau disucihamakan dari HPI yang dipersyaratkan negara tujuan, maka terhadap Media Pembawa tersebut ditolak Pengeluarannya dengan menerbitkan Surat Penolakan.

Pasal 17

- (1) Terhadap Media Pembawa yang akan dikeluarkan dari suatu area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan secara klinis dan/atau laboratoris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Media Pembawa tersebut:
 - a. bebas dari HPIK, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pembebasan dengan diterbitkan SKIMHP Domestik;
 - b. tertular HPIK Golongan I, atau busuk atau rusak, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan tindakan penolakan dengan diterbitkan Surat Penolakan; atau
 - c. tertular HPIK Golongan II, maka terhadap Media Pembawa tersebut dapat diberikan perlakuan.
- (2) Apabila setelah diberikan perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Media Pembawa:
 - a. dapat disembuhkan atau disucihamakan dari HPIK Golongan II, maka Media Pembawa tersebut dibebaskan dengan diberikan SKIPP Domestik; atau
 - b. tidak dapat disembuhkan atau disucihamakan dari HPIK Golongan II, maka terhadap Media Pembawa tersebut ditolak Pengeluarannya dengan diterbitkan Surat Penolakan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Media Pembawa dipersyaratkan Pemeriksaan kesehatan apabila Media Pembawa berasal dari Instalasi Karantina Ikan yang telah memiliki sertifikat CKIB, pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) didasarkan atas hasil survailan HPI atau HPIK di Instalasi Karantina Ikan tersebut.
- (2) Dalam hal hasil survailan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan negara tujuan, terhadap Media Pembawa tersebut diterbitkan SKIPP.
- (3) Dalam hal hasil survailan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan antararea, terhadap Media Pembawa tersebut diterbitkan SKIMHP Domestik.
- (4) Dalam hal verifikasi hasil survailan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak memenuhi persyaratan negara tujuan atau antararea, terhadap Media Pembawa tersebut ditolak Pengeluarannya dengan menerbitkan Surat Penolakan disertai dengan alasan.

Pasal 19

- (1) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dilaksanakan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak Petugas Karantina menerima Media Pembawa dari Pemilik/kuasanya.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan/atau laboratoris masih diperlukan Tindakan Karantina lebih lanjut, jangka waktu Tindakan Karantina dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

Selama dilakukan Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Media Pembawa dilarang untuk:

- a. dipindahtempatkan dari Instalasi Karantina atau tempat Tindakan Karantina ke tempat lain tanpa izin dan pengawasan dari Petugas Karantina;
- b. dipindahtanggankan dari pemilik Media Pembawa kepada pihak lain; dan
- c. mengubah jenis, jumlah dan/atau ukuran Media Pembawa.

Bagian Keempat

Pengendalian Mutu Hasil Perikanan

Pasal 21

- (1) Pengendalian Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terhadap Pengeluaran Hasil Perikanan **diawali** dengan tindakan **Evaluasi Hasil Perikanan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. evaluasi administrasi: dan
 - b. evaluasi teknis.
- (2) Evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud **pada ayat (1)** huruf

- a, berupa pemeriksaan terhadap kebenaran data yang tercantum pada PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (3) Hasil evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- memenuhi persyaratan administrasi; dan
 - tidak memenuhi persyaratan administrasi.
- (4) Terhadap hasil evaluasi administrasi yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan evaluasi teknis yang meliputi:
- laporan/rekaman hasil surveilan paling sedikit laporan terakhir yang dilengkapi Surat Keterangan Hasil Surveilan; dan
 - laporan hasil pengujian dari kegiatan pengambilan contoh yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal.
- (5) Terhadap hasil evaluasi administrasi yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan penolakan disertai dengan alasan.
- (6) Hasil evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam hal dinyatakan:
- sesuai, maka dapat ditindaklanjuti untuk proses penerbitan SKIPP; atau
 - tidak sesuai, maka dilakukan tindakan penolakan disertai dengan alasan.

Pasal ...

Pengeluaran Media Pembawa berupa Ikan hidup sebagai Barang Bawaan dapat dilaksanakan dengan ketentuan:

- berasal dari instalasi karantina ikan yang telah menerapkan CKIB;**
- merupakan Media Pembawa yang diijinkan pengeluarannya keluar Wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
- berukuran panjang total sampai dengan 10 (sepuluh) cm dengan jumlah paling banyak 10 (sepuluh) ekor atau berukuran panjang total diatas 10 (sepuluh) cm sampai dengan 20 (dua puluh) cm dengan jumlah paling banyak 5 (lima) ekor; dan**

d. tidak untuk diperdagangkan.

Pasal 22

- (1) Hasil Perikanan berupa Barang Bawaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan:
 - a. berat paling banyak 10 kg (sepuluh kilogram) ~~atau~~ *dan* memiliki nilai paling besar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. merupakan Hasil Perikanan yang diijinkan pengeluarannya keluar Wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. tidak untuk diperdagangkan.
- (2) Terhadap hasil perikanan berupa bawang bawaan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Keterangan Barang Bawaan *SKLL*, *kecuali dipersyaratkan oleh negara tujuan*.
- (3) Dalam hal negara tujuan mempersyaratkan sertifikat penerapan PMMT/HACCP, pengeluaran Hasil Perikanan berupa Barang Bawaan mengikuti ketentuan evaluasi hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (4) *Barang bawaan oleh pelintas batas dilintas batas negara mengikuti ketentuan perjanjian bilateral (BTA).*

Pasal 23

- (1) **Proses** penerbitan SKIPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf a dilakukan melalui verifikasi lapangan.
- (2) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan **kebenaran**:
 - a. nama dan alamat pengirim barang;
 - b. nama dan alamat penerima barang;
 - c. nama dan alamat UPI;
 - d. jenis komoditas;
 - e. nomor kontainer/ *seal*;
 - f. volume; dan
 - g. kemasan;
- (3) Dalam hal hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dinyatakan sesuai, diterbitkan SKIPP dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.

(4) Dalam hal hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak sesuai, terhadap Hasil Perikanan tersebut ditolak Pengeluarannya dengan menerbitkan Surat Penolakan dengan disertai alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.

(5) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:

- a. analisis kepatuhan pelaku usaha; dan
- b. frekuensi Pengeluaran.

(6) Ketentuan mengenai analisis kepatuhan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal ...

(1) Terhadap pengeluaran hasil perikanan dari suatu area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dilakukan Evaluasi Hasil Perikanan berupa evaluasi administrasi.

(2) Hasil evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Hasil perikanan berasal dari UPI yang memiliki Sertifikat penerapan PMMT/HACCP; dan
- b. Hasil perikanan tidak memiliki Sertifikat penerapan PMMT/HACCP.

(3) Terhadap hasil evaluasi administrasi yang memiliki Sertifikat penerapan PMMT/HACCP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan evaluasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).

(4) Terhadap hasil evaluasi administrasi yang tidak memiliki Sertifikat penerapan PMMT/HACCP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan pengujian mutu produk dengan parameter sesuai spesifikasi produk, paling sedikit melalui uji organoleptik.

(5) Hasil evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan:

- a. sesuai, diterbitkan SKIMHP Domestik; atau
 - b. tidak sesuai, dilakukan tindakan penolakan disertai dengan alasan
- (6) hasil pengujian organoleptik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa:
- a. Hasil Perikanan memenuhi persyaratan mutu organoleptik, diterbitkan SKIMHP Domestik ; atau
 - b. Hasil Perikanan tidak memenuhi persyaratan mutu organoleptik, dilakukan tindakan penolakan disertai dengan alasan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai parameter pengujian mutu produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 32

- (1) Terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang telah dilakukan Tindakan Karantina dan Pengendalian Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), terhadap seluruh kemasan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dipasang tanda pengaman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan.

BAB IV

BENTUK DOKUMEN TINDAKAN KARANTINA IKAN DAN PENGENDALIAN MUTU

Pasal 33

Bentuk dan format dokumen Tindakan Karantina dan Pengendalian Mutu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang terdiri atas:

- a. Lampiran I : SKIPP;
- b. Lampiran II : SKIMHP Domestik;

BAB V

~~MASA BERLAKU~~ **KEBERLAKUAN** SKIPP, SKIMHP DOMESTIK, SKLL,
DAN SKBL

Pasal 34

- (1) SKIPP dan SPM berlaku untuk 1 (satu) kali ~~pengiriman~~ **pengeluaran** Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri.
- (2) **SKIPP dan SPM untuk pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah digunakan dalam jangka waktu paling lama 6 hari kalender sejak tanggal penerbitan.**
- (3) **SKIMHP Domestik** berlaku untuk 1 (satu) kali ~~pengiriman~~ **pengeluaran** Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari satu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (4) SKLL berlaku untuk 1 (satu) kali ~~pengiriman~~ **pengeluaran** Media Pembawa atau Hasil Perikanan *keluar wilayah Negara Republik Indonesia* atau *dari satu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.*
- (5) SKBL berlaku untuk 1 (satu) kali ~~pengiriman~~ **pengeluaran** Media Pembawa berupa Benda Lain dari satu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal ...

Dalam hal tertentu, SPM dapat diterbitkan dengan ketentuan:

- a. ~~pengeluaran hasil perikanan dilakukan oleh 1 (satu) pengirim dan 1 (satu) penerima yang dilengkapi dengan lebih dari 1 (satu) SKIPP;~~*
- b. ~~pengeluaran produk olahan yang menggunakan sebagian komponen dari hasil perikanan kurang dari 15% produk akhir serta telah memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan dari instansi lain yang berwenang; atau~~*
- c. ~~pengeluaran hasil perikanan yang dilakukan oleh pedagang/eksportir (bukan UPI) terhadap hasil perikanan yang memiliki SKIPP dan untuk 1 (satu) penerima.~~*

BAB VI

PEMERIKSAAN ULANG

Pasal 35

- (1) ~~Petugas Karantina melakukan pemeriksaan ulang untuk~~

~~memastikan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang telah dilakukan Tindakan Karantina dan Pengendalian Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak diubah jenis, jumlah dan/atau ukurannya.~~

Petugas karantina melakukan pemeriksaan ulang terhadap Media Pembawa ~~dan/atau Hasil Perikanan~~ yang akan dikeluarkan, untuk mengecek kesesuaian antara isi dokumen karantina dengan jenis, jumlah, dan/atau ukuran Media Pembawa ~~dan/atau Hasil Perikanan~~.

- (2) Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memeriksa keutuhan tanda pengaman dan/atau membuka kemasan.
- (3) Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat ~~2 (dua)~~ 3 (tiga) jam sebelum keberangkatan di Tempat Pengeluaran atau di tempat pemeriksaan karantina.

Pasal 36

- (1) Apabila berdasarkan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, jenis, jumlah, dan/atau ukuran Media Pembawa ~~dan/atau Hasil Perikanan~~ yang akan dikeluarkan dinyatakan sesuai dengan dokumen, maka Petugas Karantina menyerahkan SKIPP, SKIMHP Domestik, SPM, SKLL, atau SKBL kepada **pemilik/kuasanya**.
- (2) Dalam hal setelah dilakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, isi dokumen tidak sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau ukuran Media Pembawa ~~dan/atau Hasil Perikanan~~ yang akan dikeluarkan, maka terhadap seluruh Media Pembawa ~~dan/atau Hasil Perikanan~~ tersebut dilakukan penolakan dan/atau **tindakan lain** ~~penahanan untuk diproses lebih lanjut~~ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal pemeriksaan ulang dilakukan dengan membuka kemasan Media Pembawa ~~dan/atau Hasil Perikanan~~

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), pemilik/kuasanya wajib mengemas kembali Media Pembawa ~~dan/atau Hasil Perikanan~~ tersebut di bawah pengawasan Petugas Karantina.

- (2) Setelah Media Pembawa ~~dan/atau Hasil Perikanan~~ dilakukan pengemasan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap kemasan Media Pembawa tersebut dipasang tanda pengaman kembali oleh Petugas Karantina.

BAB ...

Penahanan hanya untuk konteks Pemasukan dan pemenuhan dokumen

Pasal 38 (setuju untuk dihapuskan)

- ~~(1) Terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang akan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia dan/atau antarArea di dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang pada saat di Tempat Pengeluaran tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), dilakukan tindakan penahanan dengan diterbitkan Surat Penahanan Sementara.~~
- ~~(2) Terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang dikenakan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilakukan:
 - ~~a. tindakan penolakan terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang tidak dilindungi, tidak dilarang dan/atau tidak dibatasi Pengeluarannya dengan diterbitkan Surat Penolakan; atau~~
 - ~~b. tindakan pemeriksaan kesehatan terhadap Media Pembawa yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi Pengeluarannya.~~~~
- ~~(3) Terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang ditolak Pengeluarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, apabila setelah 2 (dua) hari sejak diterbitkan surat penolakan tidak diurus, atau busuk, atau rusak, maka terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan tersebut dilakukan pemusnahan dengan diterbitkan Surat Pemusnahan.~~
- ~~(4) Apabila setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana~~

~~dimaksud pada ayat (2) huruf b, ternyata:~~

- ~~a. Media Pembawa tertular HPIK, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pemusnahan dengan diterbitkan Surat Pemusnahan; atau~~
 - ~~b. Media Pembawa tidak tertular HPIK, maka terhadap Media Pembawa tersebut diserahkan lembaga pemerintah yang membidangi konservasi atau lembaga penelitian dan/atau pengembangan perikanan atau dilepasliarkan.~~
- ~~(5) Tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) huruf a, dilakukan oleh Petugas Karantina dengan disaksikan pemilik/kuasanya dan/atau instansi terkait.~~

Pasal 39

Petugas Karantina tidak dapat dituntut ganti rugi atas kerusakan dan/atau kematian Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan atau keterlambatan pemberangkatan, sepanjang Tindakan Karantina dan/atau Pengendalian Mutu Hasil Perikanan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PUNGUTAN JASA KARANTINA DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN

Pasal 40

- (1) Pemilik atau kuasanya wajib membayar pungutan jasa Tindakan Karantina dan/atau Pengendalian Mutu Hasil Perikanan.
- (2) Pungutan jasa Tindakan Karantina dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus disetor ke kas negara.
- (3) Besarnya pungutan dan tata cara pembayaran jasa Tindakan Karantina dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran jasa Tindakan Karantina dan Pengendalian Mutu

Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum SKIPP, **SKIMHP Domestik, SPM, SKLL, SKBL** atau surat penolakan diserahkan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, setiap Pengeluaran ~~Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang akan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri atau dari satu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia~~ yang sudah dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina atau sedang dikenakan Tindakan Karantina ~~dan Pengendalian Mutu~~ diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2005 tentang Tindakan Karantina Ikan untuk Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina.

Pasal 42

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. ketentuan mengenai Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (*Health Certificate for Fish and Fish Products*), Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik, dan **Surat Persetujuan Muat**, *Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produk Perikanan* sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.32/MEN/2012 tentang Jenis, Penerbitan, dan Dokumen Tindakan Karantina Ikan;
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2005 tentang Tindakan Karantina Ikan untuk Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina; dan
- c. **Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.26/MEN/2008 tentang Kewenangan Penerbitan, Format, dan Pemeriksaan Sertifikat Kesehatan Di Bidang Karantina Ikan dan Sertifikat Kesehatan di Bidang Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan,**

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

- (1) Bentuk dan format SKIPP ke negara yang telah mempunyai perjanjian kerja sama berupa *Mutual Recognition Arrangement* (MRA), atau *Memorandum of Understanding* (MoU), atau sejenisnya, disesuaikan dengan perjanjian kerja sama tersebut.
- (2) Bentuk dan format SKIPP ke negara dengan persyaratan tertentu disesuaikan dengan kesepakatan kedua negara.

Pasal ...

- (1) Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang diperuntukkan sebagai bantuan penanggulangan bencana dilakukan tindakan Karantina dan/atau Pengendalian Mutu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal Hasil Perikanan diperuntukkan sebagai bantuan penanggulangan bencana telah memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan dari instansi lain yang berwenang, diterbitkan:
 - a. SPM untuk pengeluaran dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia; atau
 - b. SKLL untuk pengeluaran dari satu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik.

Pasal ...

- (1) Pengeluaran Media Pembawa yang diperuntukkan sebagai barang diplomatik, penelitian, pameran, atau souvenir dilakukan Tindakan Karantina sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Pengeluaran Hasil Perikanan yang diperuntukkan sebagai barang diplomatik, penelitian, pameran, atau souvenir dikenakan tindakan sesuai dengan ketentuan Barang Bawaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 44

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

Lembar Persetujuan		
No	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Dirjen PDSPKP	
3.	Kepala BKIPM	
4.	Sekretaris BKIPM	
5.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2018
TENTANG
PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA DAN/ATAU
HASIL PERIKANAN

SUSI PUDJIASTUTI



THE REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES
FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY

KI-D1

0000000000000

HEALTH CERTIFICATE FOR FISH AND FISHERY PRODUCTS

Ref. Number : _____

Description of products/Deskripsi produk :

No	Common name / Nama umum	Scientific name / Nama ilmiah	Quantity / Jumlah	Unit
TOTAL :				

1. Consignor / Pengirim barang Name / Nama : Address / Alamat :		2. Competent authority / Otoritas kompeten	
3. Consignee/Penerima barang Name / Nama : Address / Alamat :			
4. <input type="checkbox"/> Processing establishment/Unit Pengolahan ikan (UPI) <input type="checkbox"/> Farm/Budidaya Name / Nama : Establishment ID Number / No Registrasi UPI: Address (detailed) / Alamat lengkap :			
5. Capture area (only for wild) / Area tangkapan (khusus hasil tangkapan) :			
6. Country and region of origin / Negara dan daerah asal :		7. Source / Sumber : <input type="checkbox"/> farm-raised / budidaya <input type="checkbox"/> wild-caught / tangkap	
8. Port of shipment / Pelabuhan pengeluaran:		9. Means of transport / Alat transportasi <input type="checkbox"/> by airfreight/Angkutan udara <input type="checkbox"/> by seafreight/Angkutan laut <input type="checkbox"/> by road vehicle/Angkutan darat	
10. Description of commodity / Deskripsi komoditas:		11. Temperature of the commodity / Temperatur komoditas. <input type="checkbox"/> ambient (live) / ruang (hidup) <input type="checkbox"/> frozen / beku <input type="checkbox"/> chilled / dingin	
12. Commodities intended for uses as / Komoditas diperuntukkan sebagai : <input type="checkbox"/> Human consumption / Konsumsi manusia <input type="checkbox"/> Culture / breeding (broodstock, eggs, gametes) / Budidaya <input type="checkbox"/> Ornamental / Ikan hias <input type="checkbox"/> Research & Investigation / Penelitian dan pemeriksaan <input type="checkbox"/> Aquatic animal feed /baits /Pakan /umpan pancing <input type="checkbox"/> Non edible (fish skin, shell, bones, etc) / Non pangan (kulit ikan, kerang, tulang, dll)		13. Total number of package, associated batch numbers and number of packages per batch / Jumlah kemasan total terkait nomor batch dan kemasan per batch * Batch Number : *(information on batch see attachment if insufficient)	
14. Type of packaging / Jenis kemasan		15. Total quantity (kg) / Jumlah total (kg)	
16. Identification of container / seal number Identifikasi kontainer / nomor segel Container number and seal number/Nomor kontainer dan nomor segel :		17. Port of destination / Pelabuhan tujuan :	
18. Identification of transport Name of vessel / nama kapal : voyage number / nomor penerbangan :		19. Date of departure / Tanggal pengiriman :	

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2018
TENTANG
PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA DAN/ATAU
HASIL PERIKANAN

DRAFT

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Lembar Persetujuan		
No	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Dirjen PDSPKP	
3.	Kepala BKIPM	
4.	Sekretaris BKIPM	
5.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	

KOP UPT KIPM

SURAT KETERANGAN HASIL SURVEILAN

Diberikan Kepada :

(nama UPI)

(Alamat)

Dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai Laporan Hasil Surveilans No.....yang mencakup penerapan GMP, SSOP dan HACCP serta berhak mendapatkan pelayanan

Health Certificate (HC) untuk jenis produk :

- 1.....
- 2.....
- 3.....

UPI ini di Surveilans setiap bulan, Surat Keterangan Hasil Surveilans berlaku sejak diterbitkan hingga pelaksanaan surveilans berikutnya.

(tempat dikeluarkan, tanggal/bulan/ tahun)

Kepala UPT KIPM

(.....)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Lembar Persetujuan		
No	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Dirjen PDSPKP	
3.	Kepala BKIPM	
4.	Sekretaris BKIPM	
5.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2018
TENTANG
PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA DAN/ATAU
HASIL PERIKANAN

KOP UPT KIPM

REPORT OF THE TEST RESULTS
LAPORAN HASIL PENGUJIAN
No.

This is to certify that /:
Menyatakan bahwa

1. Name of sample / : 1.....
Nama sampel : 2.....
: 3.....
2. Species/ : 1.....
Spesies : 2.....
: 3.....
3. Customer / :
Pelanggan

NO	PARAMETER	METHOD	REQUIREMENT	RESULT
1	ORGANOLEPTIC Organoleptik			
2	MICROBIOLOGY Mikrobiologi			
3	<u>CHEMICAL</u> Kimia			

Test Results is valid from the date of issued
Hasil Uji ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan

.....20....

*Regional Fish Quarantine And
Inspection Agency*

(.....)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Lembar Persetujuan		
No	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Dirjen PDSPKP	
3.	Kepala BKIPM	
4.	Sekretaris BKIPM	
5.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	